

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH (LKPD) TAHUN 2023**

**(LAPORAN REALISASI ANGGARAN, LAPORAN  
OPERASIONAL, NERACA, LAPORAN EKUITAS  
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN)**

**BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH**

**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**SEI RAMPAH**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

---



# PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 1 05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SKPD : 1-05.1-04.0-00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Unit Organisasi : 1-05.1-04.0-00.02.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1-05.1-04.0-00.02.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KEMAJUAN/PEMURAHAN (%)
0	KEGIATAN OPERASIONAL			
0.1	BEBAN DAEBAH	3.244.157.185,00	4.175.081.923,00	-22,30
0.1.01	BEBAN OPERASI	3.244.157.185,00	4.175.081.923,00	-22,30
0.1.02	Beban Pegawai	2.402.818.155,00	2.848.588.522,00	-15,85
0.1.03	Beban Barang dan Jasa	773.039.500,00	1.188.395.371,00	-34,95
0.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	68.299.530,00	38.097.030,00	-50,54
	<b>SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(3.244.157.185,00)</b>	<b>(4.175.081.923,00)</b>	<b>0</b>
	KEGIATAN NON OPERASIONAL			
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIAYA</b>	<b>(3.244.157.185,00)</b>	<b>(4.175.081.923,00)</b>	<b>0</b>
	POS LUAR BIAYA			
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIAYA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(3.244.157.185,00)</b>	<b>(4.175.081.923,00)</b>	<b>0</b>

Sei Rampah, 22 Februari 2024

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

FRIITS JEKI PRAPANCA DAMANKESE, M.Si

NIP. 197806012003121004



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 1-05.1-04.0-00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Unit : 1-05.1-04.0-00.02.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Sub Unit : 1-05.1-04.0-00.02.000.0 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	897.116.233,00	1.035.141.463,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3.244.157.185,00)	(4.175.001.923,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN KESALAHAN MENDASAR		
Kesejahteraan	0,00	0,00
KI WAJIBAN UNIT KIKONSOLIDASIKAN	1.141.590.699,00	4.037.254.694,00
EKUITAS AKHIR	1.794.549.747,00	897.116.233,00

Seo Ranjulu, 22 Februari 2024

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**ERLIS UKI PRAPANCA DAMANI SEMBU**  
NIP. 197906012003121004





# PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urutan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
SKPD : 1.05.1.04.0-00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Unit Organisasi : 1.05.1.04.0-00.02.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Sub Unit Organisasi : 1.05.1.04.0-00.02.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5	BELANJA DAERAH	3.658.774.808,00	3.441.590.699,00	94,06	4.037.254.883,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.310.774.808,00	3.100.450.999,00	93,65	4.037.254.883,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.448.084.400,00	2.376.792.200,00	95,03	2.848.589.522,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	862.710.178,00	723.658.400,00	99,04	1.188.665.171,00
5.2	BELANJA MODAL	348.000.000,00	341.140.000,00	98,03	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Bangsal	348.000.000,00	341.140.000,00	98,03	0,00
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>13.658.774.808,00</b>	<b>13.441.590.699,00</b>	<b>0</b>	<b>14.037.254.883,00</b>
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKEMBANG</b>	<b>1.658.774.808,00</b>	<b>3.441.590.699,00</b>	<b>9</b>	<b>14.037.254.883,00</b>

Sel Rampah,  
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Serdang Bedagai

Frits Ueki Prapanca Damanik, SE, Msi.  
NIP. 19780601 200312 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NERACA

Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 1-05.1-04.0-00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Unit : 1-05.1-04.0-00.02 000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Sub Unit : 1-05.1-04.0-00.02.000.0 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

URAIAN	2023	2022
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
Persediaan	1.123.200,00	504.300,00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>1.123.200,00</b>	<b>504.300,00</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Peralatan dan Mesin	2.210.807.400,00	2.210.807.400,00
Gedung dan Bangunan	1.138.215.000,00	1.138.215.000,00
Jalan, Jaringan, dan Ingeniería	341.140.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(2.564.659.997,00)	(2.498.380.467,00)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>1.125.502.403,00</b>	<b>852.641.933,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Aset Lain-lain	44.150.000,00	44.150.000,00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>44.150.000,00</b>	<b>44.150.000,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.170.775.603,00</b>	<b>897.316.233,00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Belanja	76.025.856,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>76.025.856,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>76.025.856,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EKUITAS</b>		
<b>EKUITAS</b>		
Ekuitas	1.094.749.747,00	897.316.233,00
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1.094.749.747,00</b>	<b>897.316.233,00</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1.094.749.747,00</b>	<b>897.316.233,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>1.170.775.603,00</b>	<b>897.316.233,00</b>

Sei Rampah,  
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Serdang bedagai

Frits Ueki Prapanca Damanik, SE, Msi.  
NIP.19780601 200312 1 004

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Neraca; dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sei Rampah, 2023

Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Serdang Bedagai



**FRITS UEKI PRAPANCA DAMANIK, SE, M.SI**

**NIP. 197806012003121004**



## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

##### **Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan tahun 2023, disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu SKPD yang termasuk dalam Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian. Dalam hal ini memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan administrasi. Karena fungsi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan data dan informasi dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam bentuk Laporan Keuangan tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah. Laporan Keuangan ini diharapkan nantinya dapat dijadikan salah satu sumber data dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.

##### **Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);



2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007



- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2009 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  29. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai; 7
  30. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
  31. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 26 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Perintah Kabupaten Serdang Bedagai;



32. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023;
33. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2022.

#### **Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan**

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.



## **BAB II**

### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

#### **Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

##### **A. Pengelolaan Belanja Daerah**

###### **1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah**

Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah

Belanja Daerah pada dasarnya dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Terdapat tiga elemen penting yang saling bersentuhan dalam menentukan belanja daerah yaitu masyarakat sebagai pemberi amanat, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan peran dan fungsinya masing-masing sebagai pelayan masyarakat. Dengan demikian belanja daerah merupakan perwujudan dari amanah rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam



meningkatkan kesejahteraan dan pelayanannya kepada masyarakat. Namun demikian dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah diperlukan kecermatan bagi semua pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan agar dapat menentukan skala prioritas yang tepat sasaran.

**B. Target, Realisasi dari Program dan Kegiatan**

URAIAN	ANGGARAN	REALIASI	%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>65.375.242,00</b>	<b>61.503.650,00</b>	<b>92,14</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.470.400,00	5.003.200,00	77,32
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.148.092,00	12.856.000,00	97,77
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.156.000,00	37.044.450,00	99,70
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>551.400.500,00</b>	<b>541.760.000,00</b>	<b>98,25</b>
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	551.400.500,00	541.760.000,00	98,25
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>101.887.250,00</b>	<b>101.887.250,00</b>	<b>100,00</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	101.887.250,00	101.887.250,00	100,00
<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>403.774.600,00</b>	<b>341.140.000,00</b>	<b>84,49</b>
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	403.774.600,00	341.140.000,00	84,49
<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>61.453.311,00</b>	<b>61.182.500,00</b>	<b>99,24</b>
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	30.009.450,00	29.551.500,00	98,47
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	31.643.361,00	31.631.000,00	99,96
<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>31.429.225,00</b>	<b>5.325.000,00</b>	<b>16,94</b>
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	31.429.225,00	5.325.000,00	16,94



**BAB III**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**Laporan Realisasi Anggaran**

**Belanja**

<b>Anggaran 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>
<b>3.658.774.608,00</b>	<b>3.441.590.699,00</b>	<b>4.037.254.693,00</b>

Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah, maka pada Tahun Anggaran 2023 akun Belanja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dialokasikan sebesar Rp. 3.658.774.608,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 3.441.590.699,00 atau 94,06 %. Susunan Belanja Daerah pada Laporan Realisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2023 dibagi atas Belanja Operasi sebagaimana dimuat dalam tabel berikut:

**Realisasi Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2022**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>%</b>	<b>REALISASI 2022</b>
<b>BELANJA</b>	<b>3.658.774.608,00</b>	<b>3.441.590.699,00</b>	<b>94,06</b>	<b>4.037.254.693,00</b>



## Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.310.774.608,00</b>	<b>3.100.450.699,00</b>	<b>93,65</b>	<b>4.037.254.693,00</b>
Belanja Pegawai	2.448.064.430,00	2.326.792.299,00	95,05	2.848.589.522,00
Belanja Barang dan Jasa	862.710.178,00	773.658.400,00	89,68	1.188.665.171,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>348.000.000,00</b>	<b>341.140.000,00</b>	<b>98,03</b>	<b>0,00</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	348.000.000,00	341.140.000,00	98,03	0,00

Adapun penjelasan anggaran dan realisasi Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

### Belanja Operasi

<b>Anggaran 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>
<b>3.310.774.608,00</b>	<b>3.100.450.699,00</b>	<b>4.037.254.693,00</b>

Belanja Operasi diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) jenis belanja, yaitu: (1) Belanja Pegawai, (2) Belanja Barang dan Jasa.

Dalam Tahun Anggaran 2023 Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp. 3.310.774.608,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp. 3.100.450.699,00 atau 93,65 %. Bila dibandingkan dengan realisasi belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 4.037.254.693,00.

### Belanja Pegawai

<b>Anggaran 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>
<b>2.448.064.430,00</b>	<b>2.326.792.299,00</b>	<b>2.848.589.522,00</b>

Belanja pegawai merupakan pengeluaran yang dipergunakan untuk Belanja Pegawai yang penggunaannya adalah untuk gaji PNS, Tambahan penghasilan PNS, honorarium/upah PNS/Non PNS dalam melaksanakan program dan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Pegawai dalam Laporan Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berasal dari jumlah anggaran dan realisasi Belanja Pegawai/Personalia dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.



## Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Dalam Tahun Anggaran 2023, Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 2.448.064.430,00 realisasinya mencapai sebesar Rp. 2.326.792.299,00 atau sebesar 95,05 %. Bila dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.848.589.522,00 sebagaimana dimuat dalam tabel berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%
Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	890.242.254,00	883.939.300,00	99,29
Belanja Tunjangan Keluarga	97.120.000,00	96.389.046,00	99,25
Belanja Tunjangan Jabatan	121.640.000,00	121.540.000,00	99,92
Belanja Tunjangan Fungsional Umum	15.050.000,00	14.210.000,00	94,42
Belanja Tunjangan Beras	56.044.000,00	54.604.680,00	97,43
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.393.020,00	934.638,00	67,09
Belanja Pembulatan Gaji	12.268,00	9.193,00	74,93
Belanja Iuran Asuransi Kesehatan	49.529.514,00	37.839.112,00	95,07
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan	2.272.447,00	1.795.469,00	79,01
Belanja Iuran Jaminan Kematian	5.817.880,00	5.386.399,00	92,59
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.107.491.512,00	1.003.404.462,00	90,60
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	106.740.000,00	106.740.000,00	100,00
<b>JUMLAH</b>	<b>2.448.064.430,00</b>	<b>2.326.792.299,00</b>	<b>95,05</b>

### Belanja Barang dan Jasa

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
862.710.178,00	773.658.400,00	1.188.665.171,00

Belanja barang dan jasa, belanja ini dipergunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, yang mencakup belanja pakai habis, bahan/material, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, cetak pengadaan, sewa gedung, perlengkapan kantor, makan dan minum, pakaian dinas beserta atributnya dan perjalanan dinas.



## Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Barang dalam Laporan Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berasal dari jumlah anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Dalam Tahun Anggaran 2023, Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 862.710.178,00 dan realisasinya sebesar Rp. 773.658.400,00 atau sebesar 89,68 %. Bila dibandingkan dengan realisasi belanja barang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.188.665.171,00 .

### Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	11.920.200,00	0,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.492.225,00	2.400.000,00	99,90
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	11.886.642,00	9.123.000,00	79,28
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.221.450,00	5.228.500,00	99,27
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.522.950,00	5.978.000,00	91,64
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	191.000,00	135.000,00	70,66
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.254.000,00	4.252.000,00	99,95
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	2.693.400,00	1.229.800,00	45,65
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	31.643.361,00	31.631.000,00	99,96
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.678.000,00	8.331.000,00	95,58
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	23.777.000,00	0,00	0,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.496.000,00	8.496.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Umum	1.434.450,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	550.800.000,00	541.760.000,00	98,35
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.777.000,00	3.771.400,00	99,90
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.302.250,00	3.300.000,00	99,93
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	101.887.250,00	101.887.250,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.506.000,00	35.394.450,00	99,68
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.650.000,00	5.700.000,00	41,75



**JUMLAH**

862.710.178,00

773.658.400,00

89,68

**Belanja Modal**

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
348.000.000,00	341.140.000,00	0,00

Belanja Modal dikelompokkan kedalam 5 (lima) belanja, yaitu : (1) Belanja Tanah, (2) Belanja Peralatan dan Mesin, (3) Belanja Bangunan dan Gedung, (4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan (5) Belanja Aset Tetap Lainnya.

Belanja modal merupakan pengeluaran dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau bangunan aset yang tetap terwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti : pembelian bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

Pencatatan untuk perkiraan Belanja Modal dalam Tahun Anggaran 2023 didasarkan kepada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk kode rekening pengeluaran/pembelian Belanja Modal masing-masing beserta biaya lainnya yang terkait dalam rangka perolehan aset tersebut.

**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
348.000.000,00	341.140.000,00	0,00

Dalam Tahun Anggaran 2023, Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi dianggarkan sebesar Rp. 348.000.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 341.140.000,00 atau sebesar 98,03 %. Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 0,00.



**LAPORAN OPERASIONAL**

**Beban**

2023  
**Rp. 3.244.157.185,00**

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Selama Tahun 2023 Beban Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebesar Rp. 3.244.157.185,00.

**Beban Operasi**

2023  
**Rp. 3.244.157.185,00**

Beban Operasional diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) jenis belanja, yaitu: (1) Beban Pegawai, (2) Beban Barang dan Jasa (3) Beban Penyusutan (4) Beban Penyisihan Piutang dan (5) Beban Lain-Lain. Beban Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebesar Rp. 3.244.157.185,00 terdiri dari:

**Beban Operasional Tahun 2023**

URAIAN	LO 2023	LRA 2023	SELISIH
Beban Pegawai	2.402.818.155,00	2.326.792.299,00	76.025.856,00
Beban Barang dan Jasa	773.039.500,00	773.658.400,00	-618.900,00
Beban Penyusutan	68.299.530,00	0,00	68.299.530,00
<b>JUMLAH</b>	<b>3.244.157.185,00</b>	<b>3.100.450.699,00</b>	<b>143.706.486,00</b>

**Beban Pegawai**

2023  
**Rp. 2.402.818.155,00**



## Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Beban pegawai merupakan pengeluaran yang dipergunakan untuk Beban Pegawai yang penggunaannya adalah untuk gaji PNS, Tambahan penghasilan PNS honorarium/upah PNS/Non PNS dalam melaksanakan program dan kegiatan. Beban Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023 sebesar Rp. 2.402.818.155,00 sebagaimana dimuat dalam tabel berikut :

<b>Beban Pegawai Tahun 2023</b>			
URAIAN	LO 2023	LRA 2023	SELISIH
Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	883.939.300,00	883.939.300,00	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga	96.389.046,00	96.389.046,00	0,00
Belanja Tunjangan Jabatan	121.540.000,00	121.540.000,00	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum	14.210.000,00	14.210.000,00	0,00
Belanja Tunjangan Beras	54.604.680,00	54.604.680,00	0,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	934.638,00	934.638,00	0,00
Belanja Pembulatan Gaji	9.193,00	9.193,00	0,00
Belanja Iuran Asuransi Kesehatan	37.839.112,00	37.839.112,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan	1.795.469,00	1.795.469,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian	5.386.399,00	5.386.399,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.003.404.462,00	1.003.404.462,00	76.025.856,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	106.740.000,00	106.740.000,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>2.402.818.155,00</b>	<b>2.326.792.299,00</b>	<b>76.025.856,00</b>

### Beban Barang dan Jasa

**2023**  
**Rp. 773.039.500,00**

Beban ini bersumber dari pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Beban Barang dan Jasa tahun 2023 sebesar Rp. 773.039.500,00 yang terdiri dari :

#### Beban Barang dan Jasa

URAIAN	LO 2023	LRA 2023	SELISIH
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	9.979.000,00	9.123.000,00	-143.900,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.568.500,00	5.568.500,00	0,00



**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai**

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.461.000,00	5.978.000,00	-517.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	435.000,00	435.000,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.252.000,00	4.252.000,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.229.800,00	1.229.800,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	11.631.000,00	11.631.000,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Eksternal Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.330.000,00	8.330.000,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Lintas Sosial	0,00	0,00	0,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.496.000,00	8.496.000,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Penunjang Administrasi dan Sarana Umum	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	541.760.000,00	541.760.000,00	0,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
Belanja Kawat Telekomunikasi Internet/TV Berlangganan	3.773.400,00	3.773.400,00	0,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perumahan	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.314.450,00	15.314.450,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>773.039.500,00</b>	<b>773.658.400,00</b>	<b>-618.900,00</b>

Dari masing-masing Belanja Barang dan jasa dari LRA terhadap Beban Barang dan Jasa dari Laporan Operasional ada selisih sebesar Rp. -618.900,00.

**Beban Penyusutan**

**2023**  
**Rp. 68.299.530,00**

Beban Penyusutan tahun 2023 sebesar Rp. 68.299.530,00 yang terdiri dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 7.954.580,00 dan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 26.230.950,00 dan Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya sebesar Rp. 34.114.000,00.



## LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan jumlah kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan dengan tahun lalu.

**Ekuitas Awal**

2023  
Rp. 897.316.233,00

Ekuitas awal Badan Penanggulangan Bencana Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 897.316.233,00 yang merupakan ekuitas akhir per 31 Desember 2022.

**Surplus / Defisit - LO**

2023  
(Rp. 3.244.157.185,00)

Tahun anggaran 2023 Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengalami defisit Tahun 2023 sebesar (Rp. 3.244.157.185,00) ini merupakan jumlah beban pada Laporan Operasional.

**Koreksi Ekuitas Lainnya**

2023  
Rp.0,00

Per 31 Desember 2023 koreksi ekuitas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebesar Rp. 0,00). Koreksi ekuitas lainnya tersebut merupakan koreksi terhadap ekuitas pada laporan keuangan tahun 2022 akibat perubahan dari basis kas menuju akrual kepada basis akrual tahun 2023 antara lain karena penerapan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi yang mempengaruhi saldo awal aset tetap dan aset lain-lain (aset rusak berat).

**Ekuitas Akhir**

2023  
Rp. 1.094.749.747,00

Saldo ekuitas akhir tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 1.094.749.747,00 dan Rp. 897.316.233,00 Penyebab perbedaan saldo ekuitas



## Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

tahun 2023 dari ekuitas tahun 2022 yang disebabkan karena pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai belum menerapkan kebijakan kapitalisasi dan penyusutan aset. Saldo ekuitas akhir tersebut terdiri dari ekuitas awal sebesar Rp. 897.316.233,00 ditambah surplus/defisit-LO sebesar (Rp. 3.244.157.185,00) ditambah koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp. 0,00.

### NERACA

<b>Persediaan</b>	<b>31 Desember 2023</b> <b>Rp. 1.123.200,00</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>Rp. 504.300,00</b>
-------------------	--	--

Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.123.200,00 merupakan barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Untuk memperbaiki kualitas manajemen persediaan pada akhir tahun, Persediaan sesuai pengelompokan pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 sebagai berikut :

#### Daftar Persediaan

No.	Uraian	2023	2022
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	507.200,00	363.300,00
2	Persediaan Bahan Cetak	616.000,00	99.000,00
3	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	42.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.123.200,00</b>	<b>504.300,00</b>

<b>Aset Tetap</b>	<b>31 Desember 2023</b> <b>Rp. 1.125.502.403,00</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>Rp. 852.661.933,00</b>
-------------------	--	--



**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai**

Saldo awal Aset Tetap sebesar Rp. 1.125.502.403,00 merupakan saldo aset tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai per 31 Desember 2022. Pertambahan aset tetap selama Tahun 2023 berasal dari belanja modal Tahun 2023 dikurang reklasifikasi aset peralatan mesin akibat ekstrakompatabel).

Jenis Aset Tetap	Aset Tetap		Kenalkan / Penurunan
	Saldo Per 31 Des 2023	Saldo Per 31 Des 2022	
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	2.210.807.400,00	2.210.807.400,00	0,00
Gedung dan Bangunan	1.138.215.000,00	1.138.215.000,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Instalasi	341.140.000,00	0,00	341.140.000,00
Akumulasi Penyusutan	(2.564.659.997,00)	(2.496.360.467,00)	(68.299.530,00)
<b>JUMLAH</b>	<b>1.125.502.403,00</b>	<b>852.661.933,00</b>	<b>272.840.470,00</b>

<b>Tanah</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>Rp.0,00</b>	<b>Rp.0,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 yang mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai, meliputi antara lain harga pembelian dan biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan, serta biaya pembelian yang berkaitan dengan pemilikan tanah tersebut. Saldo aset tetap tanah selama tahun 2023 Rp.0,00.

<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>Rp. 2.210.807.400,00</b>	<b>Rp. 2.210.807.400,00</b>

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 yang mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai, yang meliputi harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh



## Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

dan mempersiapkannya agar dapat digunakan. Peralatan dan Mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga penggantinya. Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.210.807.400,00.

<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>31 Desember 2023</b> <b>Rp.1.138.215.000,00</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>Rp.1.138.215.000,00</b>
----------------------------	---	---

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 setelah inventarisasi dan mutasi tambah/kurang yang mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap dipakai, meliputi harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak, biaya konstruksi yang dicakup oleh kontrak konstruksi, meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dikeluarkan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain kontraktor, serta mencakup pula biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.138.215.000,00.

<b>Jalan, Jaringan dan Instalasi</b>	<b>31 Desember 2023</b> <b>Rp. 341.140.000,00</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>Rp.0,00</b>
--------------------------------------	--	---

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan aset tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2023 setelah inventarisasi dan mutasi tambah/kurang yang mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Jaringan dan Instalasi sampai siap pakai (tidak termasuk nilai tanah). Saldo Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2023 Rp. 341.140.000,00.

<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>31 Desember 2023</b> <b>Rp.0,00</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>Rp.0,00</b>
---------------------------	---	---



Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 setelah inventarisasi dan mutasi tambah/kurang yang mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat ke dalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya sampai siap pakai. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00.

**Akumulasi Penyusutan**

**31 Desember 2023**  
**(Rp. 2.564.659.997,00)**

Jumlah tersebut merupakan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp. 2.564.659.997,00) terhadap Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Sebesar Rp. 322.629.117,00 dan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp . 296.398.167,00) dan Akumulasi Penyusutan Jalan Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp. 34.114.000,00.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, dilakukan penghitungan penyusutan atas Aset Tetap yaitu Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan. Sedangkan Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak disusutkan.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022 dan Tahun 2023 yaitu :

Perhitungan Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022

NO	JENIS BUKU / ASET	PENYUSUTAN 2022	PENYUSUTAN 2023	BEBAN PENYUSUTAN 2023
1	PERALATAN DAN MESIN	1.895.396.640,00	2.207.916.880,00	7.954.580,00
2	GEDUNG DAN BANGUNAN	304.565.660,00	322.629.117,00	26.230.950,00
3	JALAN	296.398.167,00	34.114.000,00	34.114.000,00
	JUMLAH	2.496.360.467,00	2.564.659.997,00	68.299.530,00



### Informasi Lain Mengenai Aset

Selain aset tetap dan aset lainnya, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai juga melakukan penatausahaan aset yang dicatat dalam Buku Inventaris Ekstrakomptabel.

Aset tetap yang tidak memenuhi nilai satuan minimum satuan kapitalisasi tidak disajikan pada neraca laporan keuangan namun dicatat dalam Buku Inventaris Ekstra Komptable yaitu Peralatan dan Mesin ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 sedangkan Aset Tetap Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya dikecualikan dari penghitungan satuan minimum kapitalisasi. Selain itu, aset lainnya yaitu aset yang kondisinya rusak berat dan tidak memenuhi satuan minimum kapitalisasi juga dicatat dalam Buku Inventaris Ekstra Komptabel.

<b>Utang belanja</b>	<b>31 Desember 2023</b> <b>Rp. 76.025.856,00</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>Rp. 0,00</b>
----------------------	---	--

Jumlah Utang belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 76.025.856,00.

<b>Ekuitas</b>	<b>31 Desember 2023</b> <b>Rp. 1.094.749.747,00</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>Rp. 897.316.233,00</b>
----------------	--	--

Jumlah saldo ekuitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.094.749.747,00.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikianlah Catatan atas Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menyajikan tentang penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, dan merupakan satu kesatuan dari Laporan Keuangan yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Tahun Anggaran 2023. Hal tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sehingga nantinya dapat menimbulkan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, dengan demikian pada akhirnya nanti akan tercipta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) di Kabupaten ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan dengan harapan kiranya para pengguna Laporan Keuangan dapat lebih memahami isi yang terkandung dalam Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2023.

Sei Rampah,      Februari 2024

**BADAN PENANGGULANGAN    BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**FRITS UEKI PRAPANCA DAMANIK, SE, M.Si**  
**NIP. 197806012003121004**